

PERUBAHAN HUKUM DISIPLIN MILITER: DISIPLIN versus KEADILAN

Oleh:
Brigjen TNI (Purn) Natsri Anshari, SH.,LLM



Pendahuluan

Disiplin adalah hal yang sangat penting untuk memastikan efisiensi organisasi militer secara keseluruhan, termasuk efisiensi di masing-masing satuan. Efisiensi membantu untuk memastikan tercapainya tujuan. Efisiensi menjamin tingkat profesionalisme yang tinggi. Disiplin sangat penting dalam kehidupan maupun dalam kesatuan. Secara umum, militer memiliki nilai-nilai dasar seperti keberanian, disiplin, menghormati orang lain, integritas, loyalitas dan komitmen tanpa pamrih. Semua nilai-nilai ini harus diikuti dan diterapkan oleh setiap anggota militer. Disiplin diperlukan untuk menerapkan semua nilai-nilai tersebut dengan benar. Pada dasarnya disiplin adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk mempertahankan ketertiban dan pengendalian prajurit dan satuan.

Disiplin dalam kehidupan militer adalah seperti hukum dalam masyarakat sipil. Dalam masyarakat tidak akan ada kebebasan jika hukum tidak dihormati dan dipatuhi. Demikian juga, tidak akan ada ketenteraman atau keselamatan dalam kehidupan militer jika disiplin

tidak dipatuhi. Karena disiplin harus ditegakkan dalam militer, sehingga pelanggaran disiplin harus dihukum. Setiap pelanggaran disiplin militer bisa merusak efektivitas bertempur suatu kesatuan militer. Setiap pelanggaran yang akan mengurangi semangat seorang prajurit untuk melaksanakan tugas akan selalu mengganggu efektivitas kesatuannya. Jika kesatuan tersebut sedang berada dalam pertempuran, setiap bentuk penolakan bagaimanapun kecilnya, untuk melaksanakan tugas akan menimbulkan bahaya yang cukup fatal. Tanda-tanda disiplin diwujudkan: dalam penghormatan yang baik; penggunaan seragam yang benar; tindakan yang cepat dan tepat untuk merespon keadaan bahaya atau darurat; efisiensi dalam peperangan yang menghasilkan kemenangan.

Pengertian Disiplin

Disiplin berasal dari kata *disciplina* kata Latin yang berarti "untuk mengajar". Disiplin adalah suatu bentuk spesifik dari instruksi untuk membangun pengendalian diri, karakter, dan efisiensi. Disiplin Militer adalah keadaan

ketertiban dan ketaatan untuk melaksanakan setiap tugas dan perintah dalam suatu komando. Disiplin militer mencakup kesiapan untuk mengsubordinasikan kehendak atau kepentingan pribadi untuk kebaikan kelompok. Disiplin militer merupakan perluasan dan aplikasi khusus dari disiplin yang harus menjadi ketaatan dalam perilaku untuk melakukan inisiatif dan fungsi tanpa ragu bahkan tanpa adanya komandan. Disiplin dalam kesatuan diciptakan dengan menanamkan rasa percaya diri dan tanggung jawab pada setiap individu. Disiplin menuntut pelaksanaan tugas yang benar.

Kebutuhan akan disiplin ditanamkan dalam individu melalui kesadaran diri. Dalam beberapa kasus, ketika penanaman melalui kesadaran diri tidak berhasil dilakukan, penggunaan hukuman menjadi efektif untuk membuat orang yang bandel menyesuaikan dan menghargai kebutuhan akan disiplin. Penghukuman dan pujian dari atasan kepada bawahannya, baik secara perorangan maupun kolektif, atas tugas-tugas yang telah dilakukan berfungsi untuk memperkuat ikatan disiplin yang mengikat bersama dan mendorong berfungsinya satuan dengan baik.

Disiplin Militer sangat penting untuk menjaga kekuatan militer yang terorganisir dengan baik dan solid. Angkatan Bersenjata yang disiplin akan selalu keluar sebagai pemenang dalam pertempuran. Angkatan Bersenjata yang tangguh adalah kekuatan tempur yang terorganisasi dengan baik dan tingkat disiplin yang tinggi. Biasanya kita berpikir tentang disiplin dengan cara yang negatif. Tapi disiplin sebenarnya merupakan nilai positif yang melindungi kita dari bahaya dan kehancuran. Mendefinisikan disiplin adalah pelatihan yang diharapkan akan menghasilkan karakter tertentu atau pola perilaku, terutama pelatihan yang menghasilkan perbaikan moral dan mental. Disiplin merupakan metode sistematis untuk memperoleh ketaatan.¹

Disiplin dimulai dari dalam diri prajurit sehingga disiplin memberikan stabilitas pada saat perubahan yang cepat. Disiplin membantu prajurit menghindari perilaku yang merusak. Prajurit yang berdisiplin memiliki rasa tanggung jawab yang lebih tinggi. Mereka tidak melawan otoritas yang sah. Mereka juga tidak berusaha untuk menghindar dalam menghadapi masalah atau kesulitan. Disiplin adalah salah satu nilai dasar Angkatan Bersenjata. Setiap prajurit baik itu perwira atau bintara dan tamtama, dievaluasi tingkat disiplinnya. Disiplin adalah garis kehidupan militer. Angkatan Bersenjata mengikuti kode etik tertentu. Prajurit dituntut kesetiiaannya kepada negara dan perwira atasan. Ini menuntut semangat kebersamaan dan kesiapan untuk mengatasi keadaan darurat. Seorang prajurit berkewajiban untuk mematuhi perintah komandannya. Prajurit yang memiliki disiplin tinggi berani ditempatkan di garis depan melawan musuh.

Disiplin adalah dasar dari apa yang benar secara profesional, hukum, dan moral yang benar dan dengan demikian menanamkan kepercayaan dalam diri kita dan sesama prajurit. Ini adalah kepercayaan yang pasti antara sesama prajurit, para komandan, dan Angkatan Bersenjata yang membentuk dan memperkuat jiwa korsa, rasa bangga, dan budaya militer.

Pemeliharaan disiplin diri merupakan tugas utama dari seorang prajurit profesional. Untuk menjadikan Angkatan Bersenjata yang kuat dan tangguh dalam menghadapi ancaman militer yang mematikan membutuhkan disiplin dan moral yang prima. Disiplin dan moral tercermin dalam sikap dan perilaku. Kondisi disiplin dan moral dalam latihan tercermin dari konsistensi prajurit untuk memilih tindakan yang benar karena hal itu benar, meskipun tindakan itu dilakukan dalam situasi yang sangat mengancam keselamatan dirinya.

Seorang prajurit harus tetap melakukan tindakan yang bertanggung jawab dan melakukan apa yang benar di tengah kesulitan mental dan fisik. Tidak adanya disiplin yang baik berdampak negatif pada sistem hirarki kepangkatan. Kurangnya disiplin juga mengurangi keberlanjutan dan kesiapan kekuatan militer

1. *The American Heritage Dictionary*

dan menghilangkan kepercayaan, niat baik, dan harapan masyarakat terhadap Angkatan Bersenjata.

Disiplin bukan hukuman. Disiplin adalah perilaku. Disiplin adalah sikap. Disiplin adalah mengapa dan bagaimana menjadi seorang pemimpin militer. Disiplin merupakan cara untuk menjaga ketertiban yang diperlukan untuk mencapai tugas, menjaga kedaulatan dan integritas wilayah serta menjamin keselamatan bangsa.

Komandan sebagai Sumber Disiplin

Penegakan disiplin militer adalah tanggung jawab komandan militer. Komandan harus memiliki semacam mekanisme kontrol atas pelaksanaannya. Komandan memutuskan apakah seorang prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin diproses lebih lanjut dan dituntut secara pidana atau tidak. Jadi seorang komandan yang akan menjatuhkan hukuman disiplin harus memahami tentang ambang batas yuridis (*juridical threshold*) pelanggaran hukum disiplin. Komandan harus menentukan apakah intensitas pelanggaran disiplin yang terjadi cukup dijatuhi hukuman disiplin ataukah harus diproses secara pidana. Para komandan militer tetap diberikan kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara harus diserahkan kepada pengadilan militer atau dalam hal pelanggaran hukum yang ringan sifatnya, cukup diselesaikan menurut hukum disiplin militer.

Dalam hubungannya dengan kewenangan atas disiplin, komandan berada di posisi terbaik untuk mengetahui latar belakang dan motif terjadinya dugaan pelanggaran. Tentu saja ada kemungkinan komandan berusaha untuk menutup-nutupi kesalahan karena takut bahwa hal itu akan menimbulkan penilaian buruk terhadap kesatuan. Banyak contoh di mana komandan telah berusaha untuk menutup-nutupi pelanggaran disiplin dan hukum yang dilakukan oleh bawahannya. Hal itu tidak berarti bahwa komandan tidak memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk menyelesaikan pelanggaran atau menegakkan disiplin guna memastikan ketertiban dan disiplin

sesuai prosedur yang ada. Tindakan menutup-nutupi kesalahan prajurit bawahan dapat dihindarkan dengan pengawasan komandan atasan dan peranan perwira hukum yang berada di masing-masing angkatan yang secara proaktif memberikan pendapat dan saran dalam penyelesaian suatu pelanggaran disiplin militer.

Pada suatu saat misalnya, komandan mungkin tepat menerapkan sanksi disiplin yang berat karena komandan memahami bahwa ada bahaya prajurit lain di kesatuan tersebut akan terlibat dalam pelanggaran yang sama. Pada saat lain, komandan mungkin menyadari bahwa hukuman yang berat tidak tepat karena pelanggaran terjadi dalam situasi dan kondisi yang sangat membahayakan diri prajurit pada saat pertempuran.

Salah satu atribut utama komandan adalah kemampuan untuk menilai bagaimana kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit akan berdampak pada kohesi kesatuan. Tanggung jawab ini tidak dapat didelegasikan ke kesatuan atau perwira lain karena alasan sederhana bahwa komandan berada dalam posisi yang unik memastikan ketertiban dan disiplin dalam jajaran pasukan yang berada di bawah komandonya. Komandan adalah satu-satunya orang di dalam suatu kesatuan yang dapat menjamin adanya kepatuhan atas hukum dan disiplin. Jika kewenangan penegakan dan penjatuhan disiplin dilepaskan dari komandan dan dia tidak lagi mampu melaksanakan kewenangan yang penting ini, maka terjadi kontradiksi. Komandan dibebani semua tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan seluruh prajuritnya pada disiplin dan hukum tanpa memberinya wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa komandan harus mempertahankan perannya sebagai sumber disiplin dalam kesatuan. Agar peran itu efektif, maka kewenangan komandan sebagai anjum dan papera tidak boleh dilepaskan atau diserahkan kepada lembaga lain. Reformasi yang menghapus fungsi utama komandan dalam penegakan disiplin merongrong otoritas komandan dan melanggar prinsip-prinsip



tanggung jawab komando. Sangat penting bagi komandan memiliki kewenangan komandan untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap prajurit bawahannya selaras dengan tanggung jawabnya untuk memelihara dan menegakkan disiplin.

Jika bawahan tidak bertanggung jawab kepada komandan, maka mereka akan cenderung kurang mematuhi perintah komandan militer untuk melakukan operasi sesuai dengan hukum. Bahkan di saat damai sekalipun, akan sulit bagi komandan untuk membuat bawahannya mematuhi semua peraturan hukum melalui kepemimpinan yang baik saja. Adanya kewenangan komandan untuk menjatuhkan sanksi disiplin akan mendorong mereka untuk taat pada peraturan dan hukum. Selama operasi militer, penegakan disiplin menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, sangat penting bagi komandan memiliki kewenangan disiplin sehingga bawahan mengetahui komandan memiliki kewenangan untuk menegakkan kepatuhan terhadap perintah dan peraturan yang berlaku. Agar komandan melakukan kewenangannya ini secara efektif, ia harus menjadi salah satu perwira dalam rantai komando yang bertindak sebagai anjum dan/ atau papera.

Perubahan: Fokus pada Disiplin Militer atau Peradilan Militer

Militer merupakan suatu komunitas khusus yang diatur oleh disiplin tersendiri yang berbeda dari sipil. Pemerintahan yang tertib mengharuskan pengadilan untuk bersikap cermat tidak mengganggu urusan militer yang sah. Demikian juga, militer tidak mencampuri urusan peradilan.² Sinkronisasi antara dua nilai yaitu keadilan dan disiplin tidak mudah dijawab atau dipecahkan. Apakah salah satu nilai harus mendominasi nilai lainnya dan manakah yang harus diprioritaskan? Secara

historis, diasumsikan bahwa tujuan utama dari peradilan militer adalah untuk menegakkan ketertiban dan disiplin. Itulah sebabnya undang-undang memberikan kewenangan kepada para komandan militer untuk menuntut dan menghukum setiap prajurit yang berada dibawah komandonya yang diduga terlibat pelanggaran.

Secara umum, penjatuhan hukuman terhadap prajurit harus dilakukan dengan cepat dan kadang-kadang terasa keras. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya efek negatif terhadap prajurit lainnya dan menjaga soliditas kesatuan. Pada awalnya penegakan disiplin di lingkungan militer lebih mengutamakan jaminan kepastian hukum dan kurang mempertimbangkan prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut adanya prosedur yang benar (*due process*) dalam menegakkan disiplin. Seiring waktu, sistem penegakan hukum di lingkungan militer telah berevolusi. Dalam banyak hal evolusi telah mencerminkan perluasan hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana sipil ke dalam sistem peradilan militer.³

Militer adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan sistem hirarki dan komando yang tegas. Militer adalah bagian dari lembaga eksekutif. Hukum bagi militer adalah ketaatan. Kekuasaan komandan untuk mengeluarkan perintah atau kewajiban prajurit untuk mematuhi perintah tidak dapat dipersoalkan. Militer merupakan komunitas khusus yang diatur oleh disiplin yang terpisah dari disiplin yang berlaku bagi orang sipil. Hak-hak prajurit dikondisikan untuk memenuhi tuntutan utama disiplin dan tugas tertentu.

Dalam kasus pelanggaran disiplin Papera dan Anjum memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus yang terjadi. Papera memiliki hak untuk mengendalikan bawahannya tanpa campur tangan pengadilan sesuai dengan batas kewenangannya. Misalnya, Prajurit yang berulang kali melakukan pelanggaran harus dikeluarkan dari Angkatan Bersenjata

2. In *United States v. Brown* 1996, David A. Schlueter, The Military Justice System Conundrum, Military Law Review, Volume 215, Spring 2013 p. 18-19.

3. David A. Schlueter, Ibid, p.6

sesegera mungkin untuk mencegah terjadinya demoralisasi dan mempertahankan tingkat disiplin setiap prajurit dan kesatuannya.

Peradilan militer diperlukan dalam tatanan kehidupan militer untuk mengadili tindak pidana militer. Tersangka militer yang terlibat kejahatan atau pelanggaran hukum harus mendapatkan hukuman yang lebih keras. Hal itu diperlukan untuk menciptakan kekuatan tempur yang efektif. Pembeneran atas sistem tersebut bertumpu pada kebutuhan khusus dari militer untuk membentuk disiplin militer yang tinggi dalam menghadapi ancaman musuh.

Hubungan antara disiplin militer dan peradilan militer menunjukkan adanya saling hubungan yang cukup rumit. Pada awalnya sistem peradilan militer dibentuk guna untuk melindungi dan meningkatkan disiplin militer. Pengadilan militer belum menjadi instrumen keadilan yang independen tetapi tetap merupakan bagian khusus dari seluruh mekanisme perlindungan terhadap disiplin militer. Karena hukum militer senantiasa dan terus akan menjadi instrumen disiplin yang utama, bukan instrumen keadilan. Disiplin merupakan satu-satunya cara untuk mempertahankan hukum dan ketertiban, dan perluasan yurisdiksi pengadilan militer merupakan cara untuk memperkuat disiplin.

Peradilan militer menghendaki adanya disiplin, yaitu tindakan kepatuhan terhadap peraturan dan ketertiban. Kepatuhan sangat diperlukan untuk membina sedemikian banyak prajurit secara tepat, efisien dan efektif. Tetapi, kita menyaksikan bahwa hukum acara pidana militer tampaknya terlalu lamban, kurang memberikan kepastian hukum, hasilnya kurang jelas, tidak memiliki kekuatan untuk mendukung dan memperkuat penyelesaian tugas militer, membendung pelanggaran atau merehabilitasi terpidana.

Kemudian terjadi pergeseran paradigma hukum militer dari semula berfokus pada disiplin menjadi fokus pada keadilan. *US Manual for Courts Martial* misalnya menyatakan bahwa tujuan hukum militer adalah untuk meningkatkan keadilan, membantu memelihara ketertiban dan disiplin yang baik dalam angkatan bersenjata, meningkatkan efisiensi dan

efektifitas dalam lembaga militer dan dengan demikian meningkatkan keamanan nasional.⁴ Kalimat diatas menyebut terlebih dahulu tujuan untuk meningkatkan keadilan, baru kemudian memelihara ketertiban dan disiplin yang baik. Ini memberikan sinyal terjadinya pergeseran yang lebih mengutamakan keadilan daripada ketertiban dan disiplin.

Perkembangan ini setidaknya bertolak dari asumsi bahwa disiplin mengharuskan terciptanya keadilan. Militer harus menggunakan sistem hukum yang berorientasi pada keadilan untuk menjamin tegaknya disiplin. Disini, keadilan sangat esensial bagi terciptanya disiplin. *Due process* meningkatkan disiplin. Keterikatan pada proses hukum yang benar meningkatkan kepercayaan, perlindungan dan peningkatan keadilan dalam angkatan bersenjata. Pengabaian atas *due process* akan berakibat demoralisasi dan melemahkan semangat prajurit karena khawatir terjadi perlakuan yang tidak fair. Akibatnya disiplin militer dan efektifitas tempur menurun.

Tampaknya terdapat kepentingan yang saling bersaing antara disiplin militer dan pidana militer. Disatu sisi, tugas komandan militer adalah menegakkan hukum di kesatuannya. Hukum memberikan kekuasaan kepada komandan untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan atau direktif yang diperlukan untuk pembinaan komandonya. Tetapi di sisi lain prajurit yang menjadi tersangka/terdakwa berhak untuk diadili dalam pengadilan yang tidak memihak.

Tetapi apabila diperhatikan sebenarnya terdapat komponen yang saling berhubungan, terintegrasi atau tidak terpisahkan antara disiplin militer dan pidana militer. Disiplin adalah kondisi mental yang membawa kearah kesediaan untuk mematuhi suatu perintah dengan tidak mempersoalkan kesulitan atau bahaya dari tugas yang harus dilaksanakan. Ini

4. *Manual for Courts Martial, UNITED STATES*, pmb. (2012).

kelas bukan karakteristik tugas masyarakat sipil. Pembentukan kondisi mental yang demikian itu menjadi tanggung jawab komando dan suatu keharusan. Kejujuran dan keadilan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan disiplin. Sehingga, disiplin dan keadilan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan.

Suatu kasus dibawa ke pengadilan militer agar tercapai keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa dan publik. Pengadilan militer berfungsi sebagai instrumen keadilan dan pemenuhan atas fungsinya tersebut akan meningkatkan disiplin. Tidak berarti bahwa tindakan yang ditentukan oleh komandan sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat jalinan yang mendasar antara peradilan militer dan disiplin militer. Namun terdapat pertentangan yang tajam antara keduanya. Ada yang berpendapat bahwa pemeliharaan disiplin militer dalam angkatan bersenjata mengharuskan para komandan militer mengontrol proses persidangan di pengadilan militer. Tetapi ada pula yang berpandangan peradilan militer akan selalu menjadi suatu sandiwara, kecuali mekanisme peradilan terbebas dari kontrol para komandan militer.⁵

Jenderal Westmoreland and Prugh menegaskan bahwa disiplin tidak lain adalah suatu alat bagi seorang komandan, meskipun sangat penting dan mendasar. Fokusnya yang paling mendasar adalah untuk menghadapi penyelesaian tugas pokok atau misi. Keadilan mencakup kejujuran terhadap individu yang diduga melakukan pelanggaran militer dan penuntutan kepada tersangka hanya dilakukan sesuai dengan hukum. Keadilan berbeda dengan disiplin, dimana disiplin merupakan tindakan responsif terhadap peraturan yang berlaku.⁶

Perkembangan hukum disiplin militer ke depan, tampaknya mengarah pada menemukan keseimbangan antara keadilan dan disiplin. Dalam upaya menemukan keseimbangan tersebut, terdapat kecenderungan untuk melakukan liberalisasi terhadap sistem peradilan militer. Tetapi liberalisasi harus dilakukan dengan proporsional. Kewenangan para komandan militer dalam penegakan hukum disiplin dan pidana tidak boleh terlalu banyak dihapuskan, karena dapat mengakibatkan melemahnya sistem yang berlaku dalam kehidupan militer. Keadilan dan disiplin harus diatur dan dipandu untuk kepentingan yang khusus dalam dinas militer.

Pada tahun 1879, dalam suratnya kepada Jenderal W.S. Hancock, Jenderal William T. Sherman (seorang ahli hukum) menyatakan bahwa: "...adalah suatu kesalahan besar jika secara lalai kita mengizinkan hukum militer dilemahkan dengan membiarkan ahli hukum memasukkan ke dalam hukum militer prinsip-prinsip yang berasal dari praktek mereka di pengadilan sipil, yang memiliki sistem yang sangat berbeda. Kebutuhan militer bersifat khusus dan penerapan standar dan prosedur peradilan sipil dapat merugikan disiplin militer".⁷

Disiplin militer tidak dapat dilaksanakan oleh peradilan sipil yang lamban dan tidak pasti. Prosedur acara peradilan sipil untuk menentukan bersalah atau tidaknya orang sipil yang dituduh melakukan kejahatan atau pelanggaran, terlalu lambat dan terlalu rumit untuk diterapkan untuk seorang tersangka militer. Kasus-kasus pelanggaran disiplin militer dan tindak pidana militer memerlukan proses hukum yang cepat dan tidak berbelit. Misalnya, pembangkangan militer atau insubordinasi sangat memerlukan penyelesaian secepat mungkin. Kasus meninggalkan dinas tanpa ijin, desersi dan insubordinasi menimbulkan masalah

5. David A. Schlueter, *Oc Cit*, p. 28.

6. General William C. Westmoreland & General George S. Prugh, *Judges in Command: The Judicialized Uniform Code of Military Justice in Combat*, 3 *Harvard Journal of Law and Public Policy* 1, 5 (1980).

7. Letter to General W. S. Hancock, *The Army Lawyer: A History of The Judge Advocate General's Corps, 1775-1975*, at 12 (1975).

serius terhadap kemampuan militer untuk mempertahankan negara. Militer tanpa disiplin sebenarnya lebih berbahaya bagi penduduk sipil (warga negara sendiri maupun warga negara musuh) daripada musuh.

Bahkan dalam gerakan pasukan pada situasi yang tidak bermusuhan, seringkali terjadi tindakan kekerasan dan penjarahan oleh personil militer. Disiplin yang ketat ternyata tidak mampu untuk menghilangkan terjadinya hal tersebut. Kejahatan demikian seringkali terjadi sehingga diperlukan adanya pengadilan militer yang mampu menindak dan menyelesaikan kasus tindak pidana dengan cepat. Artinya diperlukan pengadilan militer yang menekankan prosedur beracara yang singkat, keputusan cepat dan hukuman tegas.

Hukum disiplin militer dan peradilan militer sekarang memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap prajurit yang terlibat perkara pelanggaran disiplin atau pidana. Prosedur acara yang terdapat dalam hukum disiplin militer telah memberikan pengakuan atas hak-hak prajurit pelaku pelanggaran. Demikian juga, prosedur acara pidana dalam hukum acara pidana militer tidak jauh berbeda dengan acara di pengadilan sipil. Saat ini prajurit memperoleh perlindungan atas hak-haknya sebagai tersangka/terdakwa sama halnya seperti tersangka/terdakwa sipil.

Pelaksanaan yurisdiksi militer juga menjawab kebutuhan praktis angkatan bersenjata. Seorang prajurit yang ditahan oleh otoritas sipil menunggu persidangan, atau kemudian ditahan dalam tahanan sipil, tidak bermanfaat bagi kepentingan dinas. Bahkan jika dia dibebaskan dengan jaminan atau pengakuan, atau pada akhirnya ditempatkan dalam masa percobaan, otoritas sipil mungkin memerlukan dia untuk tetap dalam yurisdiksinya, sehingga membuatnya tidak bisa dipindahkan atau tidak dapat digunakan untuk kepentingan tugas militer. Kejahatan militer seperti ketidak hadiran tanpa ijin (*absence without leave*), desersi, insubordinasi, sikap pengecut (*cowardice*), pemberontakan (*mutiny*) tidak dikenal dalam hukum sipil. Kejahatan tersebut bukan merupakan bentuk kejahatan dalam kehidupan sipil. Pencegahan terhadap kejahatan tersebut sangat penting bagi

keberadaan militer.

Pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan kesalahan dan penilaian hukuman yang wajar terhadap tersangka prajurit memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang umumnya tidak dimiliki oleh hakim sipil. Komandan dan perwira militer dapat dikatakan memiliki kompetensi khusus untuk mengadili pelanggaran disiplin dan hukum pidana militer. Sesuai dengan pelatihan dan pengalaman mereka. Pengalaman demikian sangat penting dan diperlukan untuk menangani pelanggaran militer murni yang dilakukan oleh prajurit.

Dalam kasus *Parkers vs. Levy*, Pengadilan telah lama mengakui bahwa militer adalah suatu masyarakat khusus yang terpisah dari masyarakat sipil. Militer juga memiliki dan mengembangkan hukum dan tradisi sendiri selama perkembangan sejarahnya yang panjang. Perbedaan antara masyarakat sipil dan militer diakibatkan dari fakta bahwa bisnis utama dari Angkatan Bersenjata adalah bertempur dan siap berperang jika terjadi ancaman yang membahayakan kedaulatan negara.⁸

Pernyataan Jenderal Sherman pada tahun 1879 menjelaskan peranan sistem hukum militer: Objek dari hukum sipil adalah untuk mengamankan semua kemungkinan kebebasan, keamanan, dan kebahagiaan bagi setiap manusia dalam sebuah komunitas untuk keselamatan semua orang. Tujuan hukum militer adalah untuk mengatur pasukan yang terdiri dari orang-orang kuat, sehingga mampu melaksanakan penggunaan kekuatan yang sebesar-besarnya atas kehendak negara. Obyek keduanya sedemikian berbeda. Masing-masing membutuhkan sistem hukum, undang-undang dan tradisi sendiri yang terpisah. Tentara adalah kumpulan orang bersenjata yang wajib untuk mematuhi satu orang. Setiap perundang-undangan, setiap perubahan aturan yang mengganggu prinsip tersebut melemahkan

8. Lihat, David A. Schlueter, Op Cit, p. 18.

tentara, merusak nilai-nilai, dan menghancurkan tujuan utama dari eksistensinya.⁹

Prosedur penegakan hukum yang berlaku untuk orang sipil, tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip utama militer diatas. Oleh karena itu, Prajurit akan mengalami demoralisasi jika terjadi transplantasi praktek hukum yang berlaku di lingkungan sipil terhadap sistem hukum dan disiplin yang berlaku di lingkungan militer.

Sistem penegakan hukum disiplin militer dan pidana militer mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Beberapa perkembangan yang terjadi diantaranya: perubahan mekanisme penjatuhan hukuman disiplin militer melalui mekanisme sidang disiplin; penempatan pengadilan militer di bawah otoritas sipil; pengurangan kewenangan komandan dalam proses penyelesaian perkara disiplin dan pidana; pengakuan atas hak diperiksa/tersangka untuk didampingi pembela/penasehat hukum. Semua bentuk perubahan dianggap diperlukan sepanjang hal itu untuk menjamin hak konstitusional dari diperiksa/tersangka serta tidak mengakibatkan hambatan terhadap pembentukan disiplin militer yang tangguh dan efisiensi komando dan kendali militer. Perubahan hukum disiplin ke depan tampaknya mengarah pada keseimbangan antara jaminan hak konstitusional prajurit dan kepentingan efisiensi militer yang bersifat integratif dan tidak dapat dipisahkan.

Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh seorang komandan militer memerlukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan prajurit. Oleh karena itu, Undang-Undang Hukum Disiplin Militer harus memberikan kesempatan kepada prajurit untuk mengajukan keberatan atau banding atas hukuman disiplin

yang dijatuhkan kepadanya. Sistem penegakan disiplin yang bertingkat ini bermanfaat untuk mencegah penjatuhan hukuman disiplin yang sewenang-wenang dan mengontrol kekuasaan menghukum yang diberikan kepada seorang komandan agar diterapkan secara bertanggung jawab.

Penjatuhan hukuman disiplin melalui mekanisme sidang disiplin muncul sebagai respon dari semakin menguatnya tuntutan *due process* dan perlindungan hak-hak individual seorang prajurit. Mekanisme sidang disiplin merupakan suatu bentuk pengaruh dari sistem peradilan militer terhadap proses penjatuhan hukuman disiplin. Seorang komandan dituntut untuk menjatuhkan hukuman disiplin dengan cara yang jujur (*fair*) dan transparan, dengan mengikuti proses hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Situasi ini menunjukkan bahwa hukuman disiplin tidak lagi secara eksklusif menjadi kekuasaan komandan yang absolut. Pertimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh perwira staf terkait dan perwira hukum menjadi faktor yang menentukan dalam penjatuhan hukuman disiplin militer.

Akan tetapi persidangan disiplin sebagai mekanisme penjatuhan hukuman disiplin banyak mengalami kelemahan. Meskipun persidangan disiplin dapat mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penjatuhan disiplin militer, tetapi mekanisme ini lamban dan menyulitkan. Umumnya, pelanggaran disiplin militer sebenarnya tidak memiliki bentuk kesalahan dan pembuktian yang rumit. Komandan dibantu para Perwira Staf dengan mudah dapat menjatuhkan hukuman disiplin yang tepat dan cepat terhadap pelaku pelanggaran disiplin militer. Apalagi para Perwira hukum berkewajiban membantu komandan dalam penjatuhan hukuman disiplin. Ke depan mungkin penjatuhan hukuman disiplin militer melalui sidang disiplin perlu ditinjau ulang atau disederhanakan. Penjatuhan hukum disiplin hendaknya tidak mengurangi kemampuan komandan untuk menjatuhkan sanksi disiplin secara cepat dan tepat.

Komandan adalah titik fokus dari disiplin dan ketertiban militer dan komandan bertanggung

9. Letter to General W. S. Hancock, President of Military Serv. Inst., from W.T. Sherman (Dec. 9, 1879), reprinted in General William T. Sherman, *Military Law* 130 (1880) (reprinted from *The Journal of the Military Service Institution of the United States*); David A. Schlueter, *Ibid*, p. 21.

jawab untuk mempertahankan komando dan kendali pasukan yang berada di bawah komandonya. Komandan dengan menggunakan semua sumber daya dan wewenang yang ada padanya harus memastikan bahwa pasukannya tidak melanggar hukum. Jika prajurit pasukannya melakukan pelanggaran, hal itu adalah sebagian besar disebabkan kegagalan komandan dalam membentuk disiplin dan mengendalikan ketaatan prajuritnya.

Jika, sebagai akibat dari sipilisasi peradilan militer, komandan kehilangan sebagian besar dari otoritas disiplin yang mereka miliki, maka para komandan tidak lagi menempati posisi tanggung jawab yang sangat penting terhadap pasukan yang berada di bawah komando mereka. Komandan militer yang telah kehilangan otoritasnya tentu tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajuritnya. Komandan militer yang telah kehilangan sebagian dari kekuasaannya, kehilangan kemampuan untuk mempertahankan disiplin melalui sistem peradilan militer, tidak bisa lagi dibebani tanggung jawab untuk menegakkan disiplin dan pengendalian pasukan tanpa kewenangan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya itu.

Penutup

Hukum disiplin militer sangat penting sebagai landasan bagi para komandan dalam menegakkan disiplin prajurit dan kesatuannya di masa damai dan di waktu perang. Reformasi peradilan militer yang menjurus pada sipilisasi peradilan militer harus disikapi dengan cermat agar tidak merusak sistem penegakan disiplin militer. Untuk itu seharusnya alasan pemisahan peradilan militer dari sistem peradilan sipil perlu dipertimbangkan. Salah satu alasan yang paling penting untuk memisahkan dan membedakan kedua sistem tersebut adalah karena adanya kewajiban hukum pada komandan militer untuk menjamin ketertiban dan disiplin prajurit dan kesatuan militer dan untuk mencegah, menindak serta menghukum prajuritnya yang melakukan pelanggaran atau kejahatan.

Dalam setiap bentuk penugasan militer memerlukan akses pada sistem disiplin yang dapat diterapkan secara cepat dan sedemikian rupa sehingga disiplin militer dapat ditegakkan, operasi tidak terhambat dan otoritas komando didukung dengan baik. Disiplin militer harus diterapkan dengan cepat. Seorang komandan harus mampu menangani dengan cepat pelanggaran disiplin untuk menjaga koehesi



kelompok, kerja sama tim dan dukungan timbal balik. Selain itu, hak-hak individual prajurit harus tetap dihormati dalam penegakan disiplin militer.

Sementara itu terdapat pemikiran untuk membedakan atau memisahkan pengaturan disiplin militer untuk masa damai dan perang. Namun penerapan dua sistem disiplin militer yang terpisah, untuk masa damai dan masa perang, akan menambah kompleksitas yurisdiksi dan penegakan hukum disiplin militer. Selain itu, sistem yang terpisah untuk penerapan disiplin militer dalam damai dan perang menunjukkan adanya dua standar yang berbeda yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam kehidupan militer.

Reformasi peradilan militer tidak boleh melemahkan wewenang dan tanggung jawab komandan untuk memastikan kepatuhan terhadap disiplin dan hukum, baik dalam keadaan damai maupun operasi militer, karena tidak ada lembaga atau pejabat pemerintah lain yang dapat menggantikan posisi komandan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban ini. Reformasi hukum disiplin militer dan peradilan militer dengan tujuan untuk membuatnya mirip dengan sistem peradilan sipil dapat merusak sistem ketertiban dan disiplin militer. Bentuk reformasi apapun yang berdampak pada pengkerdilan

atau pengurangan secara signifikan peranan komandan dalam penegakan hukum dan disiplin patut dicermati dengan seksama. Reformasi seharusnya tidak merusak esensi dari komando.

Peradilan militer yang independen harus konsisten dengan upaya komandan untuk menjaga ketertiban dan disiplin secara sah. Disiplin militer harus menyentuh keseimbangan yang tepat antara menjaga kedisiplinan dan ketertiban dan melindungi keadilan bagi terdakwa. Komandan militer tidak boleh menjatuhkan sanksi atau merugikan karir hakim militer karena komandan tidak setuju dengan putusan hakim dalam kasus tertentu. Penjatuhan sanksi yang tidak beralasan terhadap hakim militer akan berdampak buruk pada independensi peradilan dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Jika ada ketidakpercayaan yang luas kepada peradilan militer di kesatuan-kesatuan militer, hal itu dapat merusak disiplin. Komandan tidak kehilangan otoritas yang sah mereka, ketika hakim militer memutuskan perkara dan kasus dengan bebas tanpa pengaruh komandan. Reformasi hukum disiplin militer dan sistem peradilan militer tidak boleh melemahkan tanggung jawab komando dalam penegakan disiplin dan hukum.

